

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA 2018**
(Studi Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang)

SKRIPSI

OLEH :

NOVERMAN HALAWA

158510001



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

(Access From repository.uma.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN

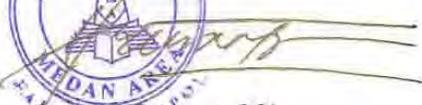
Judul Skripsi : Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Desa
Selemak Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli
Serdang)

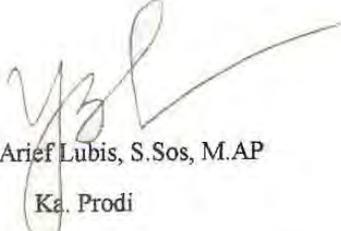
Nama : Noverman Halawa
NPM : 158510001
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si
Pembimbing I


Arnasyah Matondang, S.Sos, M.Si
Pembimbing II


Dr. Heri Kusmanto MA
Dekan


Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.AP
Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 18 September 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya mengatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Oktober 2019

Hormat Penulis



Noverman Halawa

NPM. 158510001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik universitas medan area, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Noverman Halawa

Npm : 158510001

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 14 Oktober 2019

Yang Menyatakan



(Noverman Halawa)

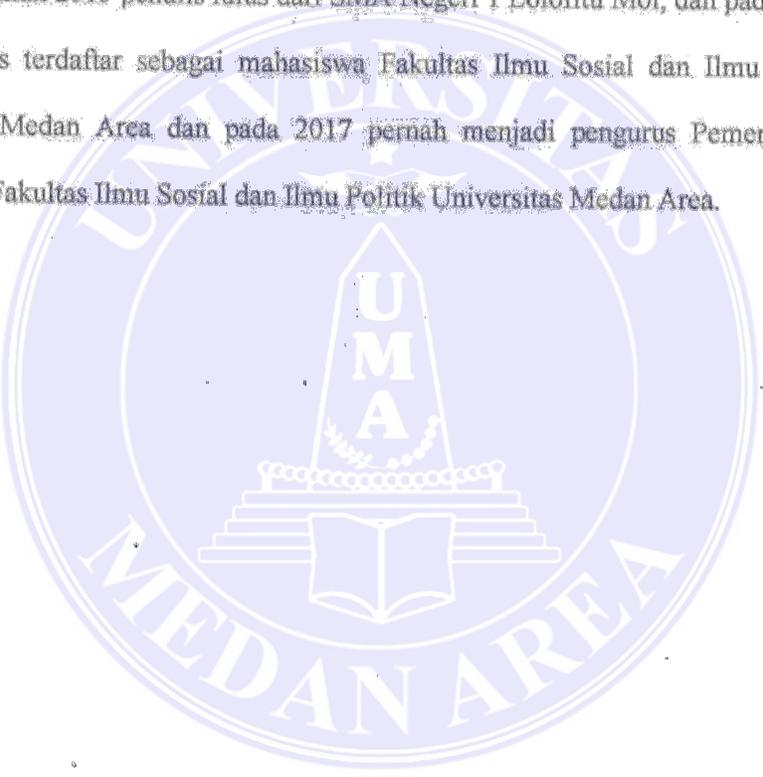
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

(Access From repository.uma.ac.id)



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Olayama Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 4 September 1995, putra dari Bapak Taliaro Halawa dan Ibu Melina Waruwu. Penulis merupakan anak ke 8 dari 8 bersaudara.

Pada tahun 2015 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Lolofitu Moi, dan pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan pada 2017 pernah menjadi pengurus Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

ABSTRAK

Dalam setiap penyelenggara pemilihan umum, tidak terlepas dari masalah yang tentu saja akan menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang sering muncul misalnya kurangnya sosialisasi untuk menerangkan tata cara pemberian suara, dan sistem pendaftaran pemilih dan masalah lainnya yang belum bisa diatasi. Hal tersebut juga terlihat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. Terkait dengan partisipasi politik wilayah yang menjadi lokasi penelitian ini juga mengalami masalah dimana tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 masih sangat rendah. Apa penyebabnya perlu diidentifikasi agar bisa dicari solusi untuk mengatasinya, Untuk itu penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, pengamatan, dokumen dan trigulasi. Harapan data yang diperoleh bisa menjadi lebih konprehensif menggambarkan fakta di lapangan. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep Arifin Anwar (2011) yang membagi tiga kajian partisipasi politik yaitu memberikan suara dalam pemilihan umum, kampanye dan lobi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018, dan Apa Faktor yang Menghambat Partisipasi Politik Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat sangat rendah, ada pun faktor yang menghambat partisipasi politik masyarakat yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Saran untuk yang akan datang diharapkan agar birokrasi bersifat netral dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, diharapkan juga agar pengawasan dalam pemilihan kepala daerah lebih diperketat.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilihan Gubernur

ABSTRACT

In every general election, it is inseparable from the problem which of course will be an agreement in its implementation. Constraints that often arise, for example, lack of socialization to the explain the procedure for voting, and voter registration systems and other problems that cannot to overcome. This was also seen in the election of the Governor and Deputy Governor of North Sumatra 2018 in Selemak Village, Hampan Perak District, Deli Serdang Regency. Related to the political participation of the region which is the location of this study also discusses the problem at the level of political participation in the election of the Governor and Deputy Governor of North Sumatra 2018 is still very low. What causes it needs to be changed so that solutions can be found to overcome it, so this research is very important. This study uses qualitative methods with interview, observation, document and trigulation techniques. Hope the data obtained can be more complete tah facts in the field. The concept used in this study is the concept of Arifin Anwar (2011) which divides three assessments of political participation, namely providing votes in elections, campaigns and lobbying. The problem in this study is the political participation of the society in the election of the Governor and Deputy Governor of North Sumatra 2018, and what factors are Inhibiting the Political Participation of the Society. Based on the research results obtained in the field, it shows that political participation in the community is very low, there are also factors that in volve community participation are internal factors and external factors. Suggestions for the future are expected so that the bureaucracy is neutral in very regional head election implementation, it is also hoped that supervision in the regional head election will be tightened.

Keywords: Political Participation, Society, Election of Governor

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini pertama penulis mengucapkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahman-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas dan merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Ada pun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “ **Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang)**”.

Penulis menyadari penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan baik dari segi moral dan material. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan cinta kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi membiayai dan memberikan doa yang tiada henti demi keberhasilan dan masa depan saya.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Armansyah Matondang, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Evy Yunita Kurniaty, S. Sos, M. IP selaku sekretaris Penguji

6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
7. Kakak, Adik dan keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada sahabat saya Hot Parlindungan, Arizal Kacaribu, Mikha, Titi, Cici, Khadafi, David yang selalu memberikan motivasi kepada saya.
9. Teman-teman seperjuangan saya dalam hal ini prodi komunikasi dan juga administrasi publik angkatan 2015 yang ikut memberikan doa dan dukungan serta teman dalam suka dan duka.
10. Kepada sahabat saya Putra dan seluruh keluarganya saya berterimakasih banyak atas doa dan dukungan yang di berikan kepada saya dan juga telah menganggap saya sebagai keluarga.
11. Seluruh pihak yang ikut membantu dan selalu mendukung selama penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Medan, September 2019

Penulis

Noverman halawa

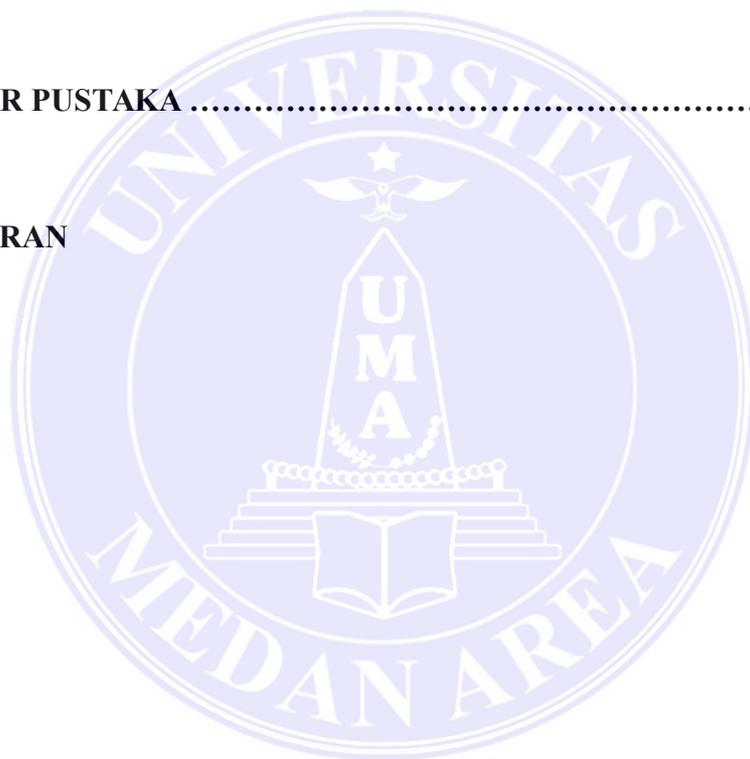
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR BAGAN.....	vi

DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar belakang	1
1.2. Rumusan masalah	4
1.3.Tujuan penelitian	4
1.4.Manfaat penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Partisipasi Politik	6
2.1.1.Pengertian dan defenisi partisipasi politik	6
2.1.3.Bentuk partisipasi politik	10
2.1.4.Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat	13
2.1.5.Faktor penyebab seseorang tidak ikut berpartisipasi	16
2.1.6.Faktor penghambat seseorang tidak ikut berpartisipasi	17
2.2.Perilaku memilih	18
2.3.Kepercayaan politik	19
2.4.Asas-asas dalam pemilihan umum kepala daerah	21
2.5.Penelitian yang relevan	22
2.6.Kerangka berpikir	23

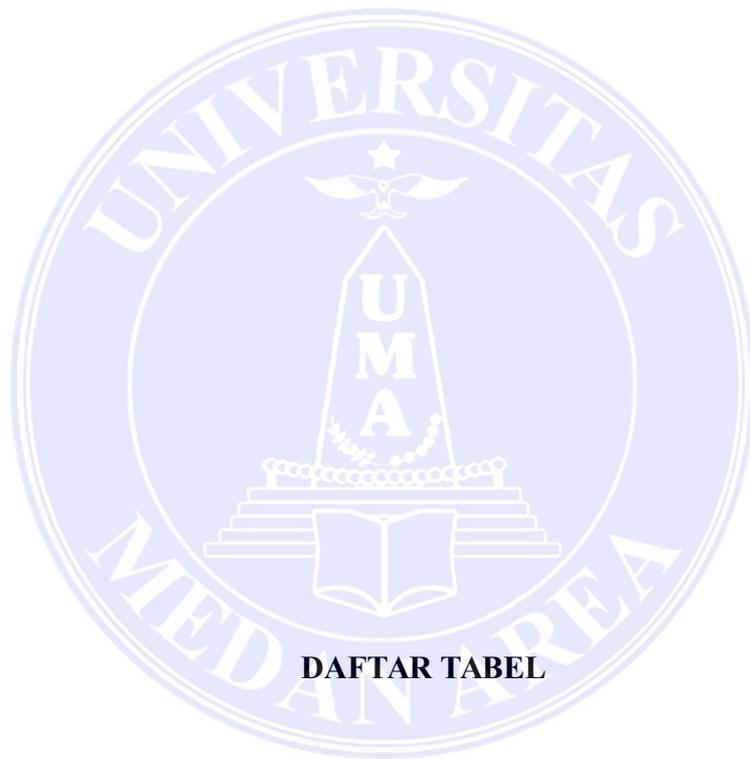
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis penelitian	26
3.2. Lokasi dan waktu penelitian	26
3.3. Informan penelitian	27
3.4. Teknik pengumpulan data	28
3.5. Metode analisis data	30
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 33
4.1. Gambar umum lokasi penelitian	33
4.1.1. Kondisi umum desa selemak	33
4.1.2. Letak geografis	34
4.1.3. Orbitasi	35
4.1.4. Demografi desa selemak	35
4.1.5. Agama	35
4.1.6. Struktur organisasi	36
4.1.7. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pilkada (KPPS)	38
4.2. Hasil penelitian dan wawancara	40
4.2.1. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018	44

4.2.2. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018	50
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.6 Kerangka Pemikiran.....	25
Bagan 4.1 Struktur Pemerintahan Desa.....	37



DAFTAR TABEL

Table 3.2 Jadwal Penelitian.....	27
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa	35
Tabel 4.1.1 Agama	36
Tabel 4.2 Daftar Jumlah Pemilih Desa Selemak	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah atau seringkali disebut dengan pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pilkada secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi momentum politik besar yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai pilihan tepat untuk menuju proses demokratisasi, sesuai dengan salah satu tujuan reformasi yaitu mewujudkan Indonesia lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Perbedaan dasar pilkada langsung dengan tatanan politik terwakil sebelumnya adalah tidak jelas statistik kehendak politik rakyat atas sosok kepala daerah yang akan memimpin.

Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pilkada langsung juga dapat dikatakan sebagai koreksi dari sistem pilkada yang terdahulu yang menggunakan mekanisme perwakilan DPRD. Peralihan sistem perwakilan ke sistem pilkada langsung menyiratkan bahwa telah adanya sebuah kemajuan dalam sistem politik dan melibatkan rakyat untuk ikut serta dalam menentukan masa depan bangsanya sendiri dengan jujur dan adil.

Latar belakang yuridis pilkada langsung adalah UU No. 32 tahun 2004 sebagai revisi dari UU No. 22 tahun 1999 yang memuat regulasi pilkada secara langsung. Seperti juga tertuang dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Bahwa Gubernur

dan Wakil Gubernur Bupati dan Walikota. Masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi. Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Hal itulah yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 bagian ke delapan tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pasal 56 (1) UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuan utama pilkada langsung adalah penguatan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi di tingkat lokal dan peningkatan harga diri masyarakat yang sudah sekian lama dimarginalkan.

Pemilukada juga merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka, yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di setiap daerah berbeda-beda dan beragam, ada yang tingkat partisipasinya tinggi dan ada juga yang rendah, hal itu dipengaruhi status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua, sosialisasi, pengalaman berorganisasi dan kesadaran dari pemilih. Pemilihan kepala daerah yang terjadi diberbagai daerah juga sarat dengan keadaan dan situasi politik yang ada dimasing-masing daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Harapan terhadap pilkada langsung bisa menumbuhkan antusiasme politik rakyat yang diwujudkan dengan tingginya partisipasi politik. Namun realitanya dalam pilkada masih ada masyarakat yang tidak berpartisipasi, dan hal ini pun terjadi di daerah pada Provinsi Sumatera Utara khususnya di Desa Selemek pada waktu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Pilgub Sumut 2018-2022 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. Masing-masing dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

yang memperoleh 20 persen kursi di DPRD atau lebih di provinsi. Kedua pasangan calon tersebut adalah Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah sebagai pasangan calon Nomor urut 1 dan Djarot Saiful Hidayat - Sihar Sitorus sebagai pasangan calon Nomor urut 2.

Pada kegiatan Pemilihan Kepala Daerah masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam kegiatan pemilihan tersebut dan ikut dalam pengambilan keputusan dan ikut dalam memilih Kepala Daerah yang menjadi pilihannya. Tetapi pada kenyataannya pada setiap pemilu baik itu Pilkadaes, Pilpres, Pilkada, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerah, karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi memilih yang kurang dan masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Desa Selemak terletak di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai Petani dan Peternak. Latar belakang masyarakat Desa Selemak dengan mata pencarian petani dan peternak. Dalam menghadapi pemilihan umum sebagian masyarakat Desa Selemak cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik dan partisipasi politiknya cenderung rendah. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya masih tinggi hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kampanye di Desa oleh calon kepala daerah.

Dalam hal ini, peneliti akan meneliti partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMUT 2018. Bagaimana partisipasi politik masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi politik masyarakat Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Partisipasi masyarakat Desa Selemak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 ?
2. Apa faktor yang Menghambat partisipasi politik masyarakat Desa Selemak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengacu pada hal-hal apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Desa Selemak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMUT 2018,
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat partisipasi masyarakat Desa Selemak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMUT 2018,

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil akhir yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni manfaat yang meliputi :

1. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan. Khususnya dibidang kajian yang berhubungan dengan partisipasi politik.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat memperjelas tentang partisipasi politik dalam pembangunan perpolitikan di Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini nantinya juga di harapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Partisipasi Politik

2.1.1 Pengertian dan Defenisi Partisipasi Politik

Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Herbert McClosky dalam (Miriam Budiarmo 2008:367) seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat :

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and directly or indirectly in the formation of public policy*).

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah partisipasi politik bukan semata sikap-sikap , namun merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat empiris, merupakan kegiatan warga negara asli, bukan individu-individu yang

bermain diwilayah pemerintahan. Pokok perhatiannya adalah kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, dan kegiatan tersebut tidak memperdulikan berhasil atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai, yaitu mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah.

Konsep partisipasi politik (*polytical participation*) secara singkat biasanya dipahami sebagai keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik secara sukarela. Kata warga negara di sini merujuk pada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang buka orang-orang yang duduk dalam lembaga-lembaga resmi seperti Parlemen, Jaksa atau Hakim. Serta keikutsertaan dalam proses-proses politik pada dasarnya adalah upaya memberikan tanggapan, saran, atau mengemukakan aspirasi-aspirasi atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan penjahatan sumber daya publik. Karena itu partisipasi politik memiliki karakter pokok bahwa keikutsertaannya didasarkan pada prinsip sukarela bukan paksaan

Sebagai defenisi umum dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*, dan sebagainya.

Robert P. Clark seorang Guru Besar pada Universitas George Mason mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik dalam bukunya *Power and Policy in the third World* mengatakan :

“partisipasi politik dapat diartikan berbeda-beda tergantung pada kultur politik (budaya politik) yang melandasi kegiatan partisipasi tersebut. Clark mengangkat pengertian partisipasi politik menurut rumusan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson Menyatakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas pribadi-pribadi warga negara untuk memengaruhi pembuatan keputusan pemerintah.

Pengertian lain dikemukakan oleh Closky bahwa partisipasi politik adalah:

“kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung(*direct*) atau tidak langsung (*indirect*) dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum”.

Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu, dan untuk menentukan orang-orang yang memegang kursi pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan wujud dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang berada ditangan rakyat.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*).

Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Ada pula pendapat bahwa partisipasi politik hanya mencakup kegiatan yang berifat positif. Akan tetapi, Huntington dan Nelson menganggap bahwa kegiatan yang ada unsur destruktifnya seperti demonstrasi, terror, pembunuhan politik, dan lain-lain merupakan suatu bentuk partisipasi. Pendapat Huntington dan Nelson dibatasi oleh beberapa hal: Pertama, menurut mereka partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini, mereka tidak memasukkan komponen-komponen subyektif seperti pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan mengenai politik serta keefektifan politik, tetapi lebih ditekankan pada bagaimana sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik dalam. Kedua, yang dimasukkan dalam partisipasi politik itu adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintah. Ketiga, kegiatan partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, terlepas itu illegal atau tidak, seperti demonstrasi, pemberontakan bahkan kekerasan. Keempat, partisipasi politik juga mencakup semua kegiatan yang

mempengaruhi pemerintah, baik efektif atau tidak, berhasil atau gagal. Kelima, partisipasi politik berupa kegiatan yang mempengaruhi pemerintah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Langsung artinya tanpa perantara, sedangkan tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan kepada pemerintah (Miriam Budiarto 2008:370).

2.1.2 Bentuk Partisipasi Politik

Warga negara secara individu yang bukan politikus atau pimpinan politik yang melakukan partisipasi politik disebut sebagai partisipasi politik, yaitu pengikut politik alternatif atau yang berminat ikut dalam kegiatan politik. Selain itu terdapat juga pengikut politik yang acuh tak acuh. Baik partisipasi politik sebagai peserta politik yang acuh tak acuh merupakan khayalak politik dalam persepektif komunikasi politik yang memiliki peran penting dalam mendorong timbulnya partisipasi politik .

Budiarto Miriam (1992:2) menjelaskan bahwa anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dalam pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak mempengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat. Dengan perkataan lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek, dan ini dinamakan *political efficacy*.

Menurut Anggoro Sahayon (2013:151) ada beberapa bentuk partisipasi politik diantaranya adalah

1. Partisipasi vertical

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan antara masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

2. Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa untuk berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Anggara Sahayan (2013:152) membedakan partisipasi politik dalam dua bagian, yaitu: konvensional dan tidak konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional dalam pemilihan umum misalnya adalah memberikan suara dalam pemilu, ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kampanye, bergabung dalam kelompok kepentingan tertentu, melakukan lobi-lobi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, serta menjadi kandidat. Bentuk partisipasi politik konvensional lain yang lebih aktif antara lain adalah ikut ambil bagian dalam kegiatan kampanye, bergabung dalam tim sukses, dan menyumbang dana, karena bentuk partisipasi politik ini berperan lebih aktif dalam memperjuangkan keinginan atau tuntutan. Bentuk yang lebih aktif adalah ikut berkompetisi menjadi kandidat, karena keikutsertaannya dalam proses politik nyaris sempurna karena kandidat harus mengeluarkan dana untuk pencalonan dan kampanye, atau langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan kampanye untuk mempengaruhi orang lain untuk memberikan dukungan, melakukan lobi-lobi untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu termasuk melobi penyandang dana serta kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tertentu.

Dalam arti non-konvensional, partisipasi politik mencakup berbagai kegiatan yang cenderung melibatkan banyak orang dalam suatu bentuk kelompok massa dan kadang disertai dengan pelanggaran tertib hukum dan kekerasan. Partisipasi politik non-konvensional dapat diterima secara luas apabila tidak disertai aksi pengrusakan dan kekerasan, misalnya aksi protes dengan cara berpawai seraya membawa spanduk dan protes yang berisi dengan berbagai tuntutan, mengkoordinasikan aksi pemogokan di kalangan buruh atau menuntut kenaikan upah, perbaikan kondisi kerja, dan peningkatan jaminan sosial.

Sebagaimana telah dikemukakan, kegiatan aksi protes atau demonstrasi sampai tingkat tertentu dapat diterima secara luas sebagai bentuk partisipasi politik dalam masyarakat demokrasi. Orang-orang yang memberikan suara dan berdemonstrasi tampaknya merupakan bentuk nyata partisipasi politik, tetapi seringkali tindakan mereka tidak didasarkan atas motivasi dan niat pribadi pelaku-pelakunya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kontribusi partisipasi politik tidak dapat disamaratakan dalam semua sistem politik. Sistem politik yang satu lebih menekankan arti pentingnya partisipasi politik dari yang lain dalam sebuah sistem politik yang berbeda, meskipun perbedaannya tidaklah selalu formal. Dalam masyarakat yang primitif yang politiknya cenderung berintegrasi dengan kegiatan masyarakat, umumnya partisipasinya cenderung tinggi bahkan mungkin sulit untuk dibedakan dari kegiatan yang lain. Di pihak lain, dalam masyarakat yang saling berhubungan karena adanya komunikasi dan institusi, pengaruh modern, dan tradisional, partisipasinya mungkin telah dibatasi oleh faktor-faktor seperti melek huruf dan masalah-masalah umum komunikasi.

Dengan demikian persoalan partisipasi tidak saja persoalan tinggi rendahnya partisipasi, tetapi juga menyangkut variabel-variabel lain yang mempengaruhi seperti latar belakang munculnya partisipasi kerah pembangunan, konsekuensi-konsekuensi, dan pola partisipasi itu sendiri.

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat

Salah satu faktor yang turut berpengaruh dalam partisipasi politik adalah sosialisasi politik. Menurut Fred I. Greenstein (dalam Anggra Sahayan 2013:86) menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah :

“Penanaman informasi politik yang sengaja, nilai-nilai dan praktik-praktik yang oleh badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab ini dan semua usahanya mempelajari politik, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak terencana, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak hanya secara eksplisit masalah belajar politik, tetapi juga seara nominal belajar sikap nonpolitik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.”

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam (Ayi Sofyan 2012:30) antara lain yaitu :

- a. Faktor Sosial Ekonomi, status sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan pekerjaan.
- b. Faktor politik, yang meliputi :
 1. Komunikasi politik, komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik,
 2. Kesadaran politik, kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik,
 3. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan,

4. kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu,
 5. Faktor fisik individu dan lingkungan faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi, dan makhluk hidup, yang berlangsungnya, berbagai kegiatan interaksi sosial antar kelompok beserta lembaganya,
 6. Faktor nilai budaya, nilai budaya politik atau *civicculture* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik ketika politik maupun teknik atau peradaban masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap dan kepercayaan politik. Kebijakan adalah bagian keputusan politik yakni program perilaku untuk mencapai tujuan pemerintah masyarakat.
Menurut Myron Weiner dalam (Anggara Sahayan 2013:146) terdapat lima penyebabnya timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu :
1. modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat semakin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik,
 2. Perubahan struktur kelas sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik,
 3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, ide demokratisasi partisipasi telah menyebar kebangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang,

4. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, yang dicari adalah dukungan rakyat, terjadi perjuangan kelas menengah melawan kaum aristokrat telah menaruh kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Secara psikologis partisipasi politik merupakan tingkat kesadaran optimal dan kualitas integritas mental dan moral yang memotivasi setiap individu untuk melakukan berbagai aktivitas sikap dan perilaku dalam lingkup sistem politik yang sedang berlangsung. Partisipasi politik dapat dilihat dari dua sisi, yaitu visi penguasa (pemerintah) dan visi warga negara. Dari visi pemerintah, hakikat partisipasi politik mengandung makna sebagai pengakuan dan penghargaan kepada masyarakat (warga negara) dalam bentuk memberi kesempatan untuk berperan serta memikirkan masalah kehidupan negara melalui kegiatan pemilihan (dipilih) individu-individu yang akan duduk dalam lembaga-lembaga kekuasaan. Masyarakat dapat menentukan pilihannya (dipilih) sesuai dengan kepercayaan yang mereka yakini terhadap pilihan (dipilih) tersebut.

Dari sejarah politik Indonesia, krisis partisipasi pada prinsipnya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya logika formal yang menyatakan bahwa infrastruktur politik dibentuk tanpa melibatkan keikutsertaan rakyat, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh suprastruktur politik dirasakan kurang ada ikatan batin dengan sebagian rakyat. Kedua, setiap keputusan suprastruktur politik harus mengikat dan dipaksakan (*enforcement*). Hal itu karena ada pengkotakan dan aliran sempit (primodial, kesukuan, dsb) yang tidak mendapat respon dari rakyat. Ketiga, apatis yang tumbuh dan

seringkali disusul oleh manifestasi ekstern berupa separatisme dan demokrasi. Keempat adanya volume tuntutan yang tidak mendapatkan wadah yang cukup dalam suprastruktur politik, sehingga banyak persoalan pembangunan untuk mengembangkan masyarakat menjadi terganggu.

2.1.4 Faktor Penyebab Seseorang Tidak Ikut Berpartisipasi

Morris Rosenberg dalam Tamara Ardy (2016:21-22) mengemukakan tiga alasan, mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu :

- a. Karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Disini peneliti beranggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap kehidupannya.
- b. Karena orang beranggapan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan dia merasa sia-sia karena partisipasi politiknya tidak akan mempengaruhi proses politik.
- c. Karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Disini orang, misalnya tidak menghargai gagasan-gagasan politik. Tidak ada hasil yang bisa dipetik dari partisipasi tersebut. Maka orang pun enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam aktivitas politik.

Berbicara mengenai sebuah partisipasi maka persepsi masyarakat yang paling sederhana adalah hadir dan menggunakan hak pilihnya, atau bahkan tidak hadir serta tidak menggunakan hak pilihnya. Senada dengan hal tersebut, ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih.

Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga, Pendapatan tinggi memudahkan orang untuk menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu “para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang berlatar belakang pendapatan tinggi cenderung menunjukkan angka ketidakhadirannya dalam pemilu rendah”.

2.1.5 Faktor Penghambat Seseorang Tidak Ikut Berpartisipasi Politik

Menurut Putra Anrasdi (2017:9) ada beberapa faktor yang menghambat seseorang tidak ikut berpartisipasi politik.

- a. Kesibukan kegiatan sehari-hari
Peranan pemilih yang sangat kompleks dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pribadinya, selalu menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilihan. Mereka lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan mereka daripada harus ikut serta dalam urusan pemilihan.
- b. Perasaan tidak mampu
Keikutsertaan pemilih dalam dunia politik, bagi beberapa pemilih adalah suatu hal yang istimewa. Sehingga mereka berpendapat bahwa yang berhak untuk terjun di dalamnya adalah orang-orang kaya, berpendidikan, ataupun orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik tanah air.
- c. Larangan dari pihak keluarga
Pemilih mendapatkan kontrol dari keluarga untuk ikut terlibat dalam masalah pemilihan umum. Hal ini merupakan suatu hambatan bagi pemilih untuk lebih

terlibat di dalam urusan politik dan tentunya akan berpengaruh juga terhadap partisipasi pemilih serta suara politik yang akan diberikan.

2.2 Perilaku Pemilih

Menurut (Ayi Sofyan 2012:225) perilaku memilih dapat dirumuskan sebagai :

“Adanya sejumlah orang yang melakukan tindakan politik atau perilaku politik yang sengaja tidak menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilu, merupakan bentuk kegagalan sosialisasi politik dan komunikasi politik. Hal itu merupakan juga bentuk tidak efektifnya pemasaran politik atau kampanye politik terutama dalam pemilu. Khalayak memang aktif dan memiliki sifat kepala batu, hal itu harus menjadi perhatian para komunikator politik, agar mengefektifkan komunikasi politiknya, bukan saja menjelang pemilu, tetapi harus dilakukan jauh sebelumnya dalam waktu lama secara sinambung.”

Perilaku politik bukanlah merupakan suatu hal yang berdiri sendiri. Namun perilaku politik seseorang itu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa keadaan alam, kebudayaan masyarakat setempat, tingkat pendidikan dan lain-lain.

Selanjutnya, Atiek Lestari (2009:40-41) dalam penelitiannya menyatakan bahwa :

“keputusan memilih selama pemilu adalah perilaku ‘akspresif’. Perilaku ini tidak jauh berbeda dengan perilaku supporter yang memberikan dukungannya pada pemain sepak bola. Perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh loyalitas . Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apa bila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada partai politik jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa suatu partai politik tidak loyal serta tidak konsisten terhadap janji dan harapan yang telah mereka berikan.”

Kompleksitas, ketaatan, kebimbangan, dan ketidakpastian adalah ciri khas yang selalu hadir pada saat pemilih harus menentukan pilihannya. Selain itu, kebimbangan masyarakat juga dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan kontestan dalam memposisikan dirinya atas sebuah permasalahan politik, sehingga pesan politiknya

menjadi mengambang dan sukar dipahami masyarakat. Melimpahnya informasi dan pesan politik menjelang kampanye pemilu menyulitkan pemilih untuk mengolah dan menganalisisnya. Di samping itu, informasi yang tersedia sering sekali bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya.

Dalam penelitian yang dilakukan Muhammad akbar (2016:37) ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik (pemimpin, aktivis, dan warga biasa) yaitu:

1. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa.
2. Lingkungan sosial politik langsung membentuk yang membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok bergaul. Dari kelompok ini, seorang aktor politik mengalami proses sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat dan norma kehidupan bernegara.
3. Struktur kepribadian. Hal ini tercermin dalam sikap individu (yang berbasis pada kepentingan, penyesuaian diri dan eksternalisasi).
4. Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

2.3 Kepercayaan Politik

Trust diperlukan dalam hubungan individu satu dengan lainnya untuk berbagi kontes kehidupan. Suatu konteks dimana individu melakukan evaluasi pada pemerintahan dalam bentuk norma masyarakat atau nilai-nilai yang diharapkan di

dalam aturan administratif disebut sebagai *political trust*. *Trust* dianggap sebagai hal yang esensial didalam dukungan politik pada suatu pemerintahan.

Berdasarkan penelitian Muhammad Akbar (2016:41) ada 4 tipe *political trust* yang dikutip dari pendapat Christense dan Laegreid antara lain:

1. Tingginya *political trust* (sistem politik dan kinerja pemerintahan) mengidefiksikan tingginya sebaran dukungan dan dukungan yang spesifik dengan saling menguatkan antar satu dengan yang lain.
2. Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan yang lebih tinggi dari pada kinerja pemerintahan mengidefiksikan tingginya sebaran dukungan dan rendahnya dukungan yang spesifik.
3. Tingkat kepercayaan pada kinerja pemerintah lebih tinggi dari pada sistem politik mengindikasikan tingginya dukungan yang spesifik dan rendahnya sebaran dukungan.
4. Tingkat kepercayaan yang rendah pada sistem politik dan kinerja pemerintahan mengindikasikan rendahnya sebaran dukungan yang spesifik pada kasus krisis legitimasi.

Satu hal yang menjadi penting di dalam *political trust* ialah keyakinan individu terhadap sistem pemerintahan untuk kemudian menilainya. Sehingga, terdapat tiga bentuk dampak dari *political trust*, yaitu kepercayaan pada pemerintah, sinisme politik, dan kepercayaan incumbent. Ketiganya tidak terjadi secara bersamaan, namun dapat saling mendukung. Dan sesuatu yang mendasar dalam memahami konsep *political trust* yaitu perbedaannya dengan *trust* in politik. Ini diartikan sebagai kepercayaan yang dibangun di dalam dunia politik.

2.4 Asas-asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Asas adalah suatu pangkal tolak ukur pikiran untuk suatu kasus atau suatu jalan dan saran untuk menciptakan hubungan atau kondisi yang kita kehendaki. Asas pilkada berarti pangkal tolak ukur pikiran untuk melaksanakan pilkada. Suatu pilkada yang demokratis dapat tercapai jika berjalannya asas-asas yang mendasari pilkada tersebut.

Asas pilkada langsung telah diatur dalam pilkada dalam pasal 56 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004, yang menyebutkan "kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam suatu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil". Hal ini telah ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat (3) PP No. 6 Tahun 2005.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Prinsip-prinsip pilkada sama seperti prinsip umum pemilu yang diuraikan sebagai berikut : langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.

2.5 Penelitian Yang Relevan

Pada dasarnya suatu penelitian ini tidak beranjak dari nol murni, akan tetapi pada umumnya telah ada penelitian yang sejenis. Oleh karena itu dirasa perlu mengetahui penelitian yang terdahulu. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yang relevan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lidya Zakarias Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP- Universitas

Sam Ratulangi 2017

Dalam penelitiannya yang berjudul *Partisipasi Politik Masyarakat Pada pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 (Studi Di Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe).*

Tingkat partisipasi politik pemilih pada PILGUB Sulawesi utara tahun 2015 di kelurahan kolongan beha kecamatan tahuna barat yaitu pemberian suara, bentuk partisipasi politik ini tergolong masih rendah buktinya dari jumlah pemilih yang terdaftar DPT berjumlah 674, hanya 482 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya informasi yang di peroleh dan kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh para kandidat di sangihe.

2. Danil Zuanda Pangabean mahasiswa program studi ilmu pemerintahan FISIP

Universitas Medan Area 2016

Dalam penelitiannya yang berjudul *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (pilkades) Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.* Partisipasi politik masyarakat desa sebelum pemilihan kepala desa ditunjukkan dengan sikap warga ikut berbondong-bondong dalam pelaksanaan

kampanye politik dari setiap calon yang mereka usungkan. Tetapi pada hari pemilihan, dimana jumlah pemilih yang hadir pada saat pemilihan biasadilihat dari total jumlah suara yang hadir yaitu sebanyak 7.074 suara dari 32.904 pemilih. Biasa disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tergolong sangat rendah.

3. Atiek Lestari Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas

Maret Surakarta 2009

Dalam penelitiannya yang berjudul *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Studi Tentang Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Purworejo)*.dimana tingkat partisipasi politik masyarakat di kabupaten purworejo tergolong sangat rendah, karena hasil survey menunjukkan 61,2% responden kurang berpartisipasi aktif dalam Pilgub jateng 2008.

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian, kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian, dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.

Sugiyono (2016:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Partisipasi adalah keterlibatan individu-individu dalam bermacam-macam tindakan dalam kehidupan politik. Keikutsertaan itu dapat berupa kegiatan memberi atau

tidak memberi dukungan politik dalam berbagai kegiatan, terutama dalam kegiatan kampanye dan pemberian suara dalam pemilihan umum serta kegiatan dalam proses penetapan kebijakan politik. Justru itu pemilihan umum hanyalah salah satu bentuk partisipasi politik dari rakyat. Hal itu merupakan efek *motorik* atau *behavior* dari komunikasi politik yang bersifat mekanistik.

Herbert McCloky dalam Arifin Anwar (2011:210) menulis bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (*public policy*). Peran serta warga masyarakat sangatlah menentukan dalam melihat kemajuan suatu daerah ataupun negara, dimana selain menjadi objek dari tujuan kesejahteraan, publik atau masyarakat juga dapat menjadi subjek dari terciptanya suatu pembangunan yang baik. Dimana partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu modernisasi, perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi, konflik serta keterlibatan pemerintah. Kemudian Huntington dan Nelson dalam Arifin Anwar (2011:2013) membedakan dua bentuk partisipasi yaitu partisipasi bersifat otonom dan bersifat dimobilisasi. Partisipasi otonom partisipasi yang dilakukan secara sukarela oleh warga negara, sedangkan partisipasi secara mobilisasi merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan secara tidak sukarela tetapi digerakkan oleh partai politik, kandidat dan tim sukses.

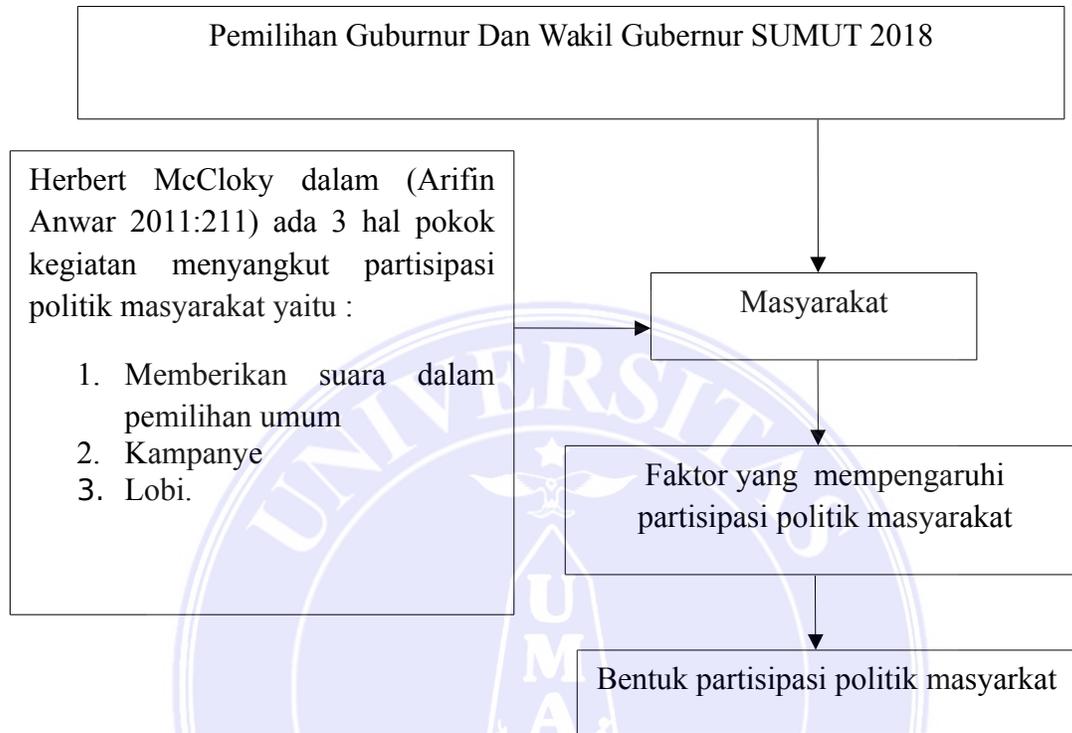
Dalam hal ini peneliti akan mengkaji dengan menggunakan teori Herbert McCloky dalam Arifin Anwar (2011:215) dengan tiga kajian yaitu memberikan suara

dalam pemilihan umum, kampanye dan lobi. Memberikan suara merupakan menjatuhkan pilihan kepada partai atau kandidat tertentu yang memiliki program yang berkaitan dengan kepentingan sosial dan demografinya. Misalnya, karyawan akan memberi perhatiannya kepada partai yang akan memberikan jaminan sosial dan perbaikan kepada karyawan tersebut. Kampanye dapat diartikan sebagai sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasanya juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Lobi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk seni dan teknik berkomunikasi yang banyak sekali dipublikasikan dalam kegiatan politik. Memang kepustakaan komunikasi politik telah lama diperkaya oleh salah satu bentuk kegiatan yang sehari-hari disebut lobi politik.

Adapun kerangka pemikiran yang digambarkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Gambar Bagan : 2.6

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dan dipilih yang berkualitas berdasarkan penelitian yang logis untuk menghindari kesalahan dan kekurangan data sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Menurut sugiyono (2016:3) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, menjadi tempat memperoleh hasil/data penelitian, yang berjudul tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2018 - bulan Januari 2019. Adapun jadwal penelitian yang tertera pada tabel dibawah ini

Tabel : 3.2
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Oktober				November				Desember				Januari			
		2018				2018				2018				2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■	■	■									
2	Seminar Proposal P								■								
3	Perbaikan Proposal									■							
4	Pengambiln Data/Penelitian									■	■						
5	Penyusunan Skripsi											■	■	■			
6	Seminar Hasil															■	
7	Perbaikan Skripsi																■
8	Sidang Meja Hijau																

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, atau pun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi yang terdiri dari :

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informasi kunci dalam penelitian ini Sekretaris Desa Selemak.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai informan utama adalah Pengawas TPS.
3. Informan tambahan, yaitu orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam persoalan penelitian namun mengetahui tentang masalah yang diteliti. Adapun

informasi tambahan adalah dalam penelitian ini adalah beberapa orang warga di Desa Selemak.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dilihat dari segi cara, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan)

Secara umum, observasi dapat dimaknai sebagai pengamatan secara focus terhadap suatu fenomena yang terjadi.

Menurut Marshall dalam Sugiyono (2016:309) menyatakan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Artinya melalui proses, peneliti dapat belajar tentang perilaku, dan memaknai perilaku tersebut.

2. Interview (Wawancara)

Dalam Esterberg dalam Sugiyono (2016:316) wawancara didefinisikan sebagai *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about of a particular topic.”* Artinya wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide, melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Sementara Susan Stainback dalam Sugiyono (2016:316), mengemukakan bahwa *“interviewing provide the researche a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained observation alone”*. Jadi dengan wawancara maka penelitian akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dll.

4. Trigulasi

Dalam teknik pengumpulan data, trigulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang ada telah ada.

Susan Stainback dalam Sugiyono (2016:329), menyatakan bahwa *“the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of whatever is being investigated”* artinya tujuan dari trigulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Selanjutnya Boghan menyatakan tujuan dari penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitar. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Nasution dalam Sugiyono (2016:333), menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, berlangsung terus sampai

penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data selama di lapangan model Mile dan Huberman.

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan tahapan untuk menerima data dan informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan trigulasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

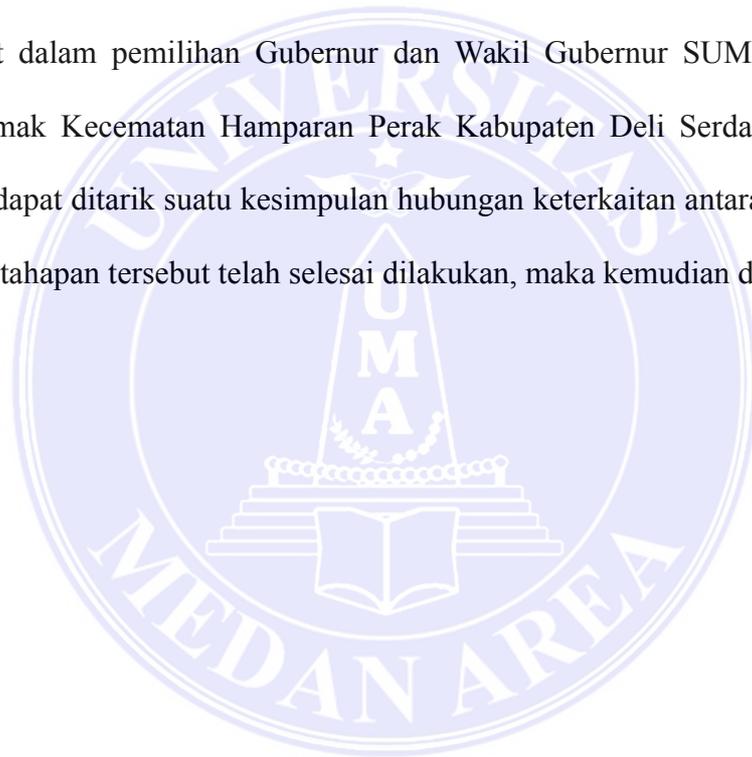
Penyajian data dilaksanakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan secara naratif sesuai dengan pemaparan yang ditampilkan dalam pembahasan hasil penelitian.

4. Kesimpulan Data

Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan, sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat

atau proposi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apa bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan berangkat dari partipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMUT 2018 Studi Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. Untuk dapat kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan hubungan keterkaitan antara keduanya. Apa bila ketiga tahapan tersebut telah selesai dilakukan, maka kemudian diverifikasi.





1.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 ditemukan bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 khususnya di Desa Selemak sudah berjalan dengan baik tetapi partisipasi politik masyarakat masih tergolong Rendah, dimana di Desa Selemak angka golput masih tergolong tinggi dengan jumlah 681 orang yang

terdiri dari 330 orang pemilih laki-laki dan 351 orang pemilih perempuan sedangkan daftar pemilih tetap sebanyak 1.928 orang. Hal tersebut juga tergambar dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa informan dan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis. Terlihat juga bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 di Desa Selemak, kesadaran politik masyarakat bisa dikatakan masih rendah.

- b. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik masyarakat di Desa Selemak pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang terdiri dari faktor teknis dan faktor pekerjaan sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor administrasi dan faktor sosialisasi.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan :

- a. Penulis mengharapkan dari semua pihak baik dari partai politik maupun dari semua kandidat dalam pemilihan kepala daerah, agar kesadaran politik masyarakat semakin ditingkatkan dengan pendidikan politik agar masyarakat tidak lagi pragmatis dalam menentukan pilihannya.
- b. Diharapkan agar birokrasi bersifat netral dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, diharapkan juga agar pengawasan dalam pemilihan kepala daerah lebih diperketat agar tidak terjadi lagi intervensi dan mobilisasi massa dalam pilkada-pilkada selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggara Sahya. 3013 .*Sistem Politik di Indonesia*. Pustaka Setia : Bandung
- Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ayi Sofian. 2012. Etika Politik Islam. CV Pustaka Setia : Bandung
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Budiarjo, Miriam, 1992, Pengertian-Pengertian Masyarakat. Jakarta : Rajawali Pers
- Hafied Cangara. 2016. Komunikasi Politik. PT RajaGrafindo Persada : Depok
- Mukarom, Zaenal. 2016. Komunikasi Politik. Bandung. Pustaka Setia
- Nurcholis, Hanif dkk. 2009. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Penerbit Universitas Terbuka
- Putra Ansradi. 2017. Partipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Fisip* Vol 4. No. 2
- Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widya Sarana, Jakarta
- Sitepu, Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi(*MIXED METHODS*). Alfabeta Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005, Tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah

Undang-undang No. 1 tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Skripsi

Lestari. 2009. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008

Mahendra. 2016. Orientasi Memilih Calon Dan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Wirata Agung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015

Muhammad Akbar. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa

Syarif Ahkam. 2016. Pengaruh Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Walikota 2015 Di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda

Tamara Ardyan. 2016. Pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kabupaten lampung selatan tahun 2015 (Studi Perbandingan Kelurahan Way Urang Dan Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)

Zakarias. 2017. Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 (Studi Di Kelurahan Kolangan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe)

Zuanda Danil. 2016. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan

LAMPIRAN



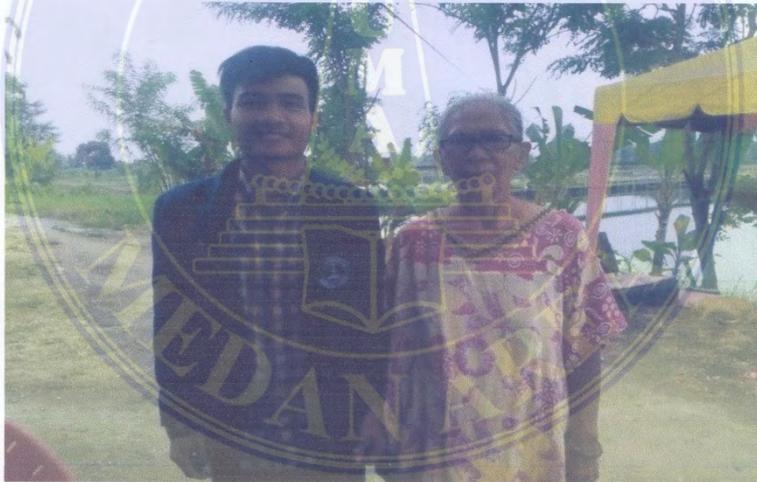
(Wawancara pada 7 Februari 2019 dengan Bapak Faisal Selaku Sekdes Selemak)



(Wawancara pada 7 Februari 2019 dengan Ibu Syahrini Selaku KPPS Desa Selemak)



(Wawancara pada 15 Februari 2019 dengan Bapak Mahmud selaku Masyarakat Desa Selemak)



(Wawancara pada 7 Februari 2019 dengan Bapak Mahmud selaku Masyarakat Desa Selemak)



(Wawancara pada 12 Februari 2019 dengan Ibu Norman)



(Wawancara pada 15 Februari dengan Ibu Eka)



(Wawancara pada 12 Februari 2019 dengan Riki Saputra selaku pengawas TPS)